



**BAGIAN ANGGARAN 005.01  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**LATIHAN BAHAN JUMILIK NEGARA  
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG  
PENGADILAN AGAMA MAROS  
Semester II TAHUN 2019**

# BAGIAN ANGGARAN 005.01



## LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA MAROS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Semester II T. A. 2019**

**Jl. Jend. Sudirman No. 9 Maros**

**Telp. 0411 371137 Fax. 0411 371137**

**Maros - Sulawesi Selatan 90511**

**e-mail : [keuangan.pamaros@gmail.com](mailto:keuangan.pamaros@gmail.com)**



---

# KATA PENGANTAR

---

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang

dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk periode Semester II tahun 2019 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Maros, 31 Desember 2019

Ketua

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulya S.H., M.H.**  
NIP. 19630317 199203 2 002

---

# DAFTAR ISI

---

	hal.
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>I. Pendahuluan</b>	1
<b>II. Dasar Hukum</b>	4
<b>III. Kebijakan Akuntansi BMN</b>	6
<b>III.1. Aset Tetap</b>	7
<b>III.1.1. Tanah</b>	7
<b>III.1.2. Gedung dan Bangunan</b>	7
<b>III.1.3. Peralatan dan Mesin</b>	8
<b>III.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	8
<b>III.1.5. Aset Tetap Lainnya</b>	8
<b>III.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	9
<b>III.1.7. Aset Barang Bersejarah</b>	9
<b>III.2. Persediaan</b>	9
<b>IV. Laporan BMN</b>	11
<b>IV.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara</b>	11
<b>IV.2. Laporan Barang Milik Negara</b>	12
<b>4.2.1. Aset Tetap</b>	15
<b>4.2.2. Barang Persediaan</b>	16
<b>4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	16

<b>4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca</b>	16
<b>V. Kendala dan Saran</b>	19
<b>5.1. Kendala</b>	19
<b>5.2. Saran</b>	19
<b>VI. Penutup</b>	20

## Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara**
- B. Laporan Barang Intrakomptabel**
- C. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel**
- D. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan**
- E. Laporan Aset Tak Berwujud**
- F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik**
- G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca**
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan**
- I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL**

---

## I. PENDAHULUAN

---

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
  - a. Perusahaan Perseroan, dan
  - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

---

### BMN DALAM SAPP

---

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset

tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

---

## II. DASAR HUKUM

---

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

---

### III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

---

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

### 3.1 ASET TETAP

#### A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

#### B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

#### C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel

dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

#### D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

#### E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

#### F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

### G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

## 3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

---

## IV. LAPORAN BMN

---

### 4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

---

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan

Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

#### 4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Agama Maros Semester II tahun 2019 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Agama Maros adalah sebesar Rp. 11.934.655.466 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET		NILAI RUPIAH
Persediaan		33.000
Tanah		4.227.132.000
Peralatan dan Mesin		1.999.963.557
Gedung dan Bangunan		7.740.323.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		39.668.200
Aset Tetap Lainnya		16.209.270
Konstruksi dalam Pengerjaan		0
Akumulasi Penyusutan Mesin		(1.654.192.943)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan		(430.017.945)

Bangunan	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4.462.673)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	26.345.000
Aset Lainnya	1.283.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1.283.000)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset tak berwujud	(26.345.000)
<b>Total</b>	<b>11.934.655.466</b>

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester II 2019 dengan Semester II 2018.

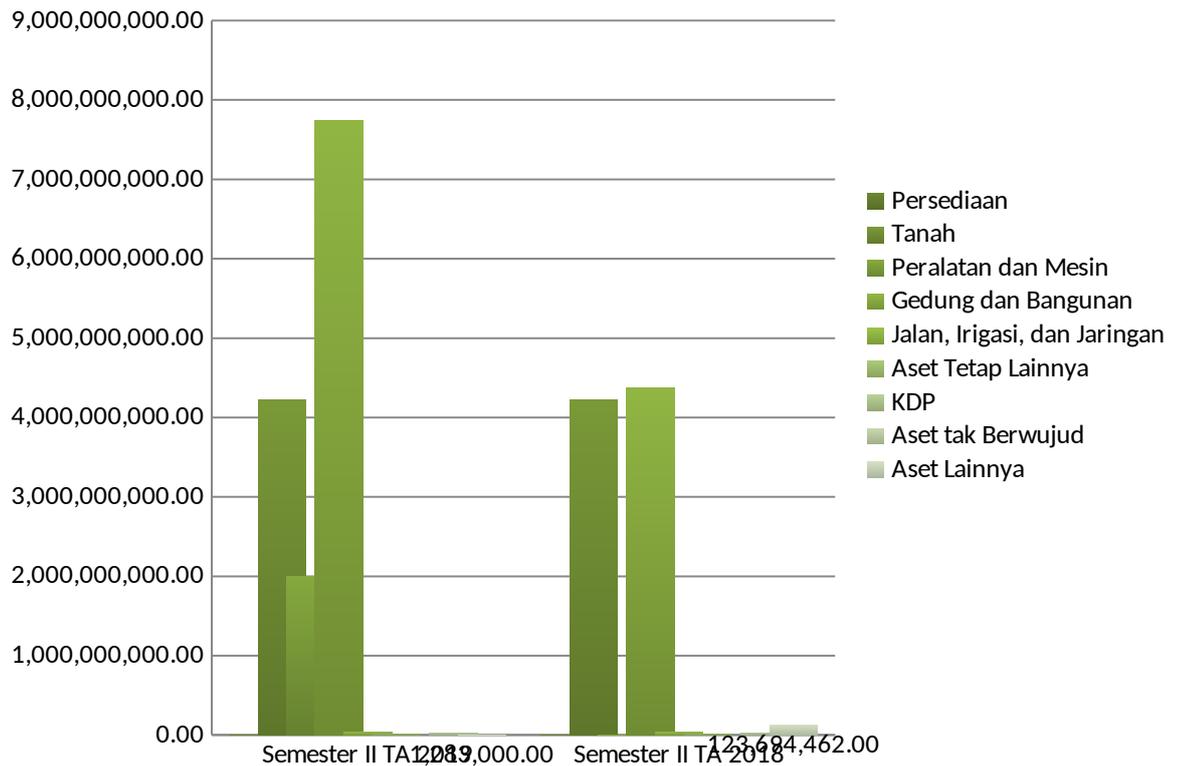
*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS  
SEMESTER II TAHUN 2018 DAN SEMESTER II TAHUN 2019  
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2019</i>	<i>SEMESTER II TA 2018</i>
Persediaan	33.000	149.500
Tanah	4.227.132.000	4.227.132.000
Peralatan dan Mesin	1.999.963.557	1.759.061.367
Gedung dan Bangunan	7.740.323.000	4.369.638.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.668.200	39.668.200
Aset Tetap Lainnya	16.209.270	16.209.270
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.654.192.943)	(1.535.759.376)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(430.017.945)	(145.654.599)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4.462.673)	(3.470.968)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	26.345.000	26.345.000

Aset Lainnya	1.283.000	123.694.462
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(1.283.000)	(122.803.462)
Akumulasi Penyusutan/Amortasi Aset tak berwujud	(26.345.000)	0
Ekstrakomptabel	43.996.981	50.973.356
<b>Total</b>	<b>11.934.655.466</b>	<b>8.778.837.750</b>

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS  
SEMESTER II TAHUN 2019 DAN SEMESTER II TAHUN 2018  
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

Chart Title



#### 4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 mengalami perubahan nilai.

- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 mengalami perubahan nilai.

### 4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar Rp. 116.500 sehingga nilai per 31 Desember 2019 menjadi Rp. 33.000,00

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS  
SEMESTER II TAHUN 2019 DAN SEMESTER II TAHUN 2018

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2019	SEMESTER II TA 2018
Barang Konsumsi	33.000	149.500
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

### 4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019 tidak mengalami perubahan nilai.

## 4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Agama Maros semester II tahun 2019 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Agama Maros semester II Tahun 2019.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MAROS  
SEMESTER II TAHUN 2019*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	33.000	149.500
Tanah	4.227.132.000	4.227.132.000
Peralatan dan Mesin	1.999.963.557	1.759.061.367
Gedung dan Bangunan	7.740.323.000	4.369.638.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.668.200	39.668.200
Aset Tetap Lainnya	16.209.270	16.209.270
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.654.192.943)	(1.535.759.376)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(430.017.945)	(145.654.599)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4.462.673)	(3.470.968)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	26.345.000	26.345.000
Aset Lainnya	1.283.000	123.694.462
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1.283.000)	(122.803.462)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset tak berwujud	(26.345.000)	(26.345.000)
<b>Total</b>	<b>11.934.655.466</b>	<b>8.727.864.394</b>

---

## V. KENDALA DAN SARAN

---

### 5.1. KENDALA

---

Pada Semester II Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Maros menemui kendala tentang sulitnya mengadakan penghapusan Barang Milik Negara karena belum terbitnya penilaian terhadap barang yang mau dihapuskan khususnya kendaraan roda dua oleh instansi terkait tentang hal itu.

### 5.2. SARAN

---

Mengingat Pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya jumlah pegawai khususnya di Pengadilan Agama Maros maka dimohon diadakan Honor bagi pengelola Barang Milik Negara terhadap Pegawai yang ditunjuk untuk itu

---

---

## VI. PENUTUP

---

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Maros tahun 2019 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 bisa ditingkatkan pada tahun berikutnya menjadi *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

*LAMPIRAN I*  
*CATATAN RINGKAS BARANG*  
*MILIK NEGARA*

*LAMPIRAN II*

*Laporan Barang  
Intrakomptabel*

*LAMPIRAN III*  
*LAPORAN BMN GABUNGAN*  
*INTRAKOMPTABEL DAN*  
*EKSTRAKOMPTABEL*

*LAMPIRAN IV*  
*LAPORAN KONSTRUKSI DALAM*  
*PENGERJAAN*

*LAMPIRAN V*  
*LAPORAN ASET TAK*  
*BERWUJUD*

*LAMPIRAN VI*

*LAPORAN PERSEDIAAN DAN  
BERITA ACARA OPNAME FISIK*

*LAMPIRAN VII*

*LAPORAN POSISI BMN DAN  
KEUANGAN PADA NERACA*

*LAMPIRAN VIII*  
*BERITA ACARA REKONSILIASI*  
*INTERNAL*

*LAMPIRAN IX*  
*BERITA ACARA REKONSILIASI*  
*DENGAN KPKNL*

*LAMPIRAN X*  
*LAPORAN KONDISI BARANG*



# **CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**

## **PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA**

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MAROS**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**SEMESTER II TAHUN 2019**

## I. Pendahuluan

### a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

**b. Entitas Pelaporan**

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Maros yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

**c. Periode Pelaporan**

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester II Tahun Anggaran 2018.

**II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara**

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

### III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Maros Semester II Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Maros.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Maros ini adalah sebesar Rp. 14.068.576.008 (*empat belas milyar enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 10.586.376.655 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2019 mutasi bertambah sebesar Rp.3.611.587.190(*tiga milyar Enam ratus Sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh rupiah*). mutasi kurang sebesar Rp. 129.387.837(*seratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*)Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Agama Maros;

14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

## IV. Ringkasan Barang Milik Negara Semester II Tahun 2019

### 1. Saldo Awal Semester II TA 2019

Nilai BMN per 2019 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Agama Maros adalah sebesar Rp. 14.068.576.008 (*empat belas milyar enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 14.024.579.027 (*empat belas milyar dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp.43.996.981 (*empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).

Terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan, sebesar Rp. 10.586.376.655 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 10.535.403.299 (*sepuluh milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 50.973.356 (*lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).

Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2019 sebesar Rp.33.000 (*tiga puluh tiga ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 149.500 (*seratus empat puluh Sembilan lima ratus rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp.116.500 (*seratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	149.500	116.500	33.000
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0

Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>149.500</b>	<b>116.500</b>	<b>33.000</b>

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp. 0 yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp. 0 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp. 0 (*nol rupiah*).

#### b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.227.132.000 (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 1.274 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 4.227.132.000 (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
2.01.01	Tanah Persil	0

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
2.01.01	Tanah Persil	0

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah 0 seluas 0 m<sup>2</sup> senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 m<sup>2</sup> senilai Rp. 0,00.

### c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros Tahun 2019 adalah sebesar Rp. , jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 1.802.882.348 (*satu milyar lima ratus empat puluh enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 240.902.190 (*dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua ribu seratus Sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

#### 1) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 434.100.003 (*empat ratus tiga puluh empat juta seratus ribu tiga rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.434.100.003 (*empat ratus tiga puluh empat juta seratus ribu tiga rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkut tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkut tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.02.01	Alat angkut Darat Bermotor	0	0

Dari jumlah Alat Angkut di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Angkut dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Angkut dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	434.100.003
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	1.283.000

Kelompok barang Alat Angkut yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/Rp. 1.283.000

## 2) Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 182.373.470 (*seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 177.873.470 (*seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.05.01	Alat Kantor	4.500.000	

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.05.01	Alat Kantor	0	0

Dari jumlah Alat Kantor di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Kantor dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Kantor dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
----------------	-----------	------------

Baik	60	182.373.470
Rusak Ringan		
Rusak Berat	1	131.000

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 kuantitas/Rp. 131.000

### 3) Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat rumah tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 611.899.575 (*Enam ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 608.399.575 (*Enam ratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah alat rumah tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.05.02	Alat rumah tangga	3.500.000	0

Mutasi Kurang Alat rumah tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.05.02	Alat rumah tangga	0	0

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Rumah Tangga dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
----------------	-----------	------------

Baik	547	611.899.575
Rusak Ringan		
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

#### 4) Alat Studio (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 28.716.000 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 8.580.000 (*delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 20.136.000 (*dua puluh juta Seratus tiga puluh enam ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Alat Studio	20.136.000	0

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Alat Studio	0	0

Dari jumlah Alat Studio di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Studio dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Studio dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	28.716.000
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat 0 0

Kelompok barang Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp.0

#### 5) Alat Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17.344.446 (*tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ratus empat puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 17.344.446 (*tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Alat Komunikasi	0	0

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Alat Komunikasi	0	

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Komunikasi dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Komunikasi dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	15	17.344.446
Rusak Ringan		0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp.0

**6) Alat Laboratorium Fisik Nuklir/Elektronika (3.08)**

Saldo Alat Elektronika Berupa UPS pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 19.850.000 (*Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 19.850.000 (*Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah*), , mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Elektronika Berupa UPS tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.08	Alat Laboratorium fisika Nuklir/Elektronika	0	0

Mutasi Kurang Alat Elektronika Berupa UPS tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.08	Alat Laboratorium fisika Nuklir/Elektronika	0	0

Dari jumlah Alat Elektronika Berupa UPS di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Alat Elektronika Berupa UPS dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Alat Elektronika Berupa UPS dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Elektronika Berupa UPS di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	19.850.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

**7) Komputer (3.10)**

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 516.900.740 (*lima ratus enam*

*bela juta sembilan ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 398.311.140 (*tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu seratus empat puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 118.589.600 (*Seratus delapan bela juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.10.01	Komputer	118.589.600	0

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.10.01	Komputer	0	0

Dari jumlah Komputer di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Komputer dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Komputer dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	53	516.900.740
Rusak Ringan		0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

#### 8) Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 232.600.304 (*dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 138.423.714 (*seratus tiga delapan*

*juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 94.176.590 (*Sembilan puluh empat juta Seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.10.02	Peralatan komputer	94.176.590	0

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.10.02	Peralatan Komputer	0	0

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Peralatan Komputer dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Peralatan Komputer dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	50	232.600.304
Rusak Ringan		0
Rusak Berat	1	45.000

Kelompok barang Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/Rp. 45.000

**Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.02 Alat Angkut	434.100.003	434.100.003	0
2.	3.05 Alat Kantor	182.373.470	177.970.470	5.183.000
3.	3.05 Alat Rumah Tangga	611.899.575	533.231.475	78.668.100
4.	3.06 Alat Studio	28.176.000	10.593.600	18.122.400
5.	3.06 Alat Komunikasi	17.344.446	17.131.502	212.944
6.	3.08 Alat Lab./Elektronika	19.850.000	3.969.996	15.880.004
7.	3.10 Komputer	516.900.740	373.437.340	143.463.400
8.	3.10 Peralatan Komputer	232.600.304	148.359.538	84.240.766
Total		2.043.784.538	1.698.013.924	345.770.614

#### d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.740.323.000 (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 4.369.638.000 (*empat milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 3.370.685.000 (*tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

##### 1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.740.323.000 (*tujuh milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 4.369.638.000 (*empat milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 3.370.685.000 (*tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Bangunan gedung kantor	3.370.685.000	

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Bangunan gedung kantor	0	

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Bangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Bangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
----------------	-----------	------------

Baik	1	7.740.323.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

#### Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	7.740.323.000	430.017.945	7.310.305.055
2.	4.02 Monumen	0	0	0
3.	4.03 Menara	0	0	0
4.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>7.740.323.000</b>	<b>430.017.945</b>	<b>7.310.305.055</b>

### e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 39.668.200 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 39.668.200 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

#### 1) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 39.668.200 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 39.668.200 (*tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Tidak ada jenis barang jaringan pada Pengadilan Agama Maros.

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Jaringan	0	

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Jaringan	0	

Dari jumlah Jaringan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Jaringan dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Jaringan dengan nilai sebesar Rp. 0 (*0 rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	39.668.200

Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

#### Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.04 Jaringan	39.668.200	4.462.673	35.205.527
	Total	39.668.200	4.462.673	35.205.527

## f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 16.209.270 (*enam belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 16.209.270 (*enam belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

### 1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 16.149.270 (*enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 16.149.270 (*enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
6.01.01	Bahan perpustakaan	0	

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
6.01.01	Bahan perpustakaan	0	

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Bahan Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Bahan Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.236	16.149.270
Rusak Ringan	0	0

Rusak Berat

231

2.310.000

Kelompok barang Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

## 2) Barang Bercorak Kebudayaan (6.02)

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 60.000 (*enam puluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 60.000 (*enam puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Alat Bercorak Kebudayaan	0	0

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Alat Bercorak Kebudayaan	0	0

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Barang Bercorak Kesenian dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Barang Bercorak Kesenian dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	6	60.000
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Barang Bercorak Kesenian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

**3) Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)**

Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Aset Tetap dalam Renovasi	0	

Mutasi Kurang Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Aset Tetap dalam Renovasi	0	

Dari jumlah Aset Tetap dalam Renovasi di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Aset Tetap dalam Renovasi dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Aset Tetap dalam Renovasi dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Dari jumlah Aset Tetap dalam Renovasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

kelompok barang Aset Tetap dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. 0

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	16.149.270	0	0
2.	6.02 Barang Bercorak Kesenian	60.000	0	0
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>16.209.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**g. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
------------	--------	------------

Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)
------------	--------	------------

Dari jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp. 0 (*0 rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

**h. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 26.345.000 (*dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 26.345.000 (*dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

**1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. (*nol rupiah*), mutasi

tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Maros tahun 2019 per golongan barang adalah sebagai berikut :

No.	Golongan Barang	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0

#### Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.				
2.				
3.				
4.				
Total				

## 2) Aset tak Berwujud

Saldo Aset tak Berwujud dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 26.345.000 (*dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 26.345.000 (*dua puluh*

enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset tak Berwujud tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Aset tak Berwujud	0	

Mutasi Kurang Aset tak Berwujud tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Aset Tak Berwujud	0	

Dari jumlah Aset tak Berwujud di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Aset tak Berwujud dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 kuantitas Aset tak Berwujud dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

kelompok barang Aset tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp. Nol

### 3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah

Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.283.000 (*satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 130.846.837 (*seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 129.387.837 (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.0	Aset yang di hentikan penggunaannya	0	

Mutasi Kurang BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
3.0	Aset yang di hentikan penggunaannya	122.411.462	6.976.375

Rincian BMN yang Dihentikan penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 per golongan barang adalah sebagai berikut :

No.	Golongan Barang	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.283.000	176.000
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0

### Akumulasi Penyusutan BMN yang Dihentikan penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintahan	1.459.000	3.684.750	-2.225.750
	<b>Total</b>	<b>1.459.000</b>	<b>3.684.750</b>	<b>-2.225.750</b>

#### i. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebanyak 0 unit, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebesar Rp. 0 unit, dan mutasi kurang sebesar 0 unit.

Barang Milik Negara

### 3.

- a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp.14.068.576.008 (*empat belas milyar enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	<b>Aset Lancar</b>						
	Persediaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	0		0		0	
	<b>Aset Tetap</b>						
	Tanah	4.227.132.000		0		4.227.132.000	
	Peralatan dan Mesin	1.999.963.557		43.820.981		2.043.784.538	
	Gedung dan Bangunan	7.740.323.000		0		7.740.323.000	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.668.200		0		39.668.200	
	Aset Tetap Lainnya	16.209.270		0		16.209.270	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	<b>Aset Lainnya</b>						
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
	Aset tak Berwujud	0		0		0	
	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	1.283.000		176.000		1.283.000	
	<b>Total</b>	<b>14.024.579.027</b>		<b>43.996.981</b>		<b>14.068.576.008</b>	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
<b>Aset Tetap</b>						
Peralatan mesin	(1.654.192.943)		(43.820.981)		(1.698.013.924)	
Gedung dan Bangunan	(430.017.945)		0		(430.017.945)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4.462.673)		0		(4.462.673)	
Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	(1,283,000)		(2.401.750)		(3.684.750)	
<b>Total</b>	<b>(2.089.956.561)</b>		<b>(46.222.731)</b>		<b>(2.136.179.292)</b>	

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan  
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	33.000	33.000	0
Tanah	4.227.132.000	4.227.132.000	0
Peralatan dan Mesin	1.999.963.557	1.999.963.557	0
Gedung dan Bangunan	7.740.323.000	7.740.323.000	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.668.200	39.668.200	0
Aset Tetap Lainnya	16.209.270	16.209.270	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	26.345.000	26.345.000	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.283.000	1.283.000	0

Total	14.050.957.027	14.050.957.027	0
-------	----------------	----------------	---

## V. Informasi BMN Lainnya

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	RP.	%.
1					
2					
3					
4					
5					

### 2. Informasi Pengelolaan BMN

#### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	4.227.132.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	1.999.963.557,00	-
3	Gedung dan Bangunan	7.740.323.000,00	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-

Jumlah

Keterangan tambahan :

- Barang Milik Negara pembelian dibawah Rp. 20 juta sedang dilaksanakan proses penetapan statusnya. b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANA	PENGHAPUSA	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses pengelola barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di pengelola barang	-	-	-	-	-
	a.Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c.Ditetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
9	Selesai Serah Terima	-	-	-	-	-

### C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	-

3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada pengelola	-

### 3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

#### a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0.(nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Maros tahun 2019 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

#### b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Pengadilan Agama Maros tahun 2019 adalah sebesar Rp. 129.387.837.(seratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

### 4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. Seringnya pegawai memindahkan barang-barang yang sudah tercatat dalam daftar barang ruangan secara sengaja

## 5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menempatkan pegawai tersendiri dalam hal pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara yang selama ini operator merangkap jabatan jadi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa  
Pengguna Semesteran Pengadilan Agama  
Maros per 31 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Barang

**Dr. Yusran, S.Ag. M.H.**  
NIP.19730406 1999031003